

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Zainuddin 2015, *Metode Penelitian Hukum - Cetakan Keenam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Effendi, Usman, 2014, *Asas Manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Napitupulu, S.K., Rubini, A.F., Khasanah, K., Rachmawati, A.d., 2017, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech (Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan)*, Departemen Perlindungan Konsumen, OJK, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan : Konsep, Regulasi & Implementasi*, Ref Publisher, Jakarta.
- Suharsini, Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumarsono, Sonny, 2010, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutedi, Andrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Cetakan Ke-1)*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
- Tim Penyusun pada Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, 2019, *Buku 1 – OJK dan Pengawasan Mikroprudensial (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*, Jakarta.

B. Artikel Jurnal :

- Harahap, Berry A., Idham, P.B., Kusuma, A.C.M., Rakhman, R.N., “Perkembangan Financial Technology Terkait *Central Bank Digital Currency (CBDC)* Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi, *Working Papper*,” Bank Indonesia, WP/2/2017;
- Hariyani, Iswi dan Serfiyani, C.Y., 2017, “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No.03, September 2017.
- Hariyanto, “Perubahan Skema Permodalan Koperasi Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perkoperasian,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.VII, No.2, Juni 2013.
- Herliana dan Nurhayati, Irna, “Efektifitas Pembentukan Badan Abritase Pasar Modal (BAPMI) Dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal,” *Mimbar Hukum*, Vol.22, No.3, Oktober 2010;
- Munzil, Fontian, “Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk *Peer To Peer Lending* Pada Aplikasi *Financial Technology* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur),” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 8 No. 2 September 2018.
- Nasution, Bismar, “Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vo.3, No.3, 03 November 2014.
- Nurhayati, Irna, “Ulasan tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,” *Mimbar Hukum*, Vol.II, No.49, Tahun 2005.
- Pratiwi, D.R., 2018, “Pentingnya Perkembangan Financial Technology Dalam Mendorong Keuangan Inklusif,” *Buletin APBN*, Vol.III, Edisi 15, Agustus 2018.
- Rahyani, W.S., “Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No.3, Oktober 2012.
- Sitompul, Zulkarnaen, “Konsepsi Transformasi Otoritas JasaKeuangan (*Conception and Trasformation Financial Services Authority*),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9, No.3, Oktober 2012.
- Zaelani, “Pelimpahan Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Delegation of Authority The Establishment of Legislation Regulation*,” *Jurnal Lesgilasi Indonesia*, Vol.9, No.1, April 2012.

Zaidatul Amina, “Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain,” *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol.1, No.1, 2012.

C. Hasil Penelitian / Tugas Akhir :

Dewangga, 2019, *Analisis Yuridis Mitigasi Risiko Kredit dan Operasional terhadap Investor dalam Memberikan Pinjaman pada Fintech Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending Berdasarkan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pardede, Marulak, dkk, 2009, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM R.I., Jakarta.

Candra, Paramitha, 2019, *Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus: Cicil.co.id dengan "NO")*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prananingtyas, Paramitha, dkk, 2019, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM R.I. Tahun 2019.

Wijayani, Regita, 2017, *Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Makalah / Pidato / Keterangan Ahli

Iman, Nofie, “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*,” materi presentasi disampaikan pada saat *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri* di Hotel Grand Aston Yogyakarta pada tanggal 22 November 2016.

Martowardojo, A.D.W., “*Sambutan Gubernur Bank Indonesia*,” Pidato pada saat *Launching Bank Indonesia Fintech Office*, 14 November 2016.

Muchtar, Z.A., “*Perihal Pungutan OJK*” disampaikan saat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam sidang pengujian Undang Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Oktober 2014.

Prasetya, Rudhy, “Pembaruan Hukum Dagang “disampaikan pada saat Diskusi Publik, tanggal 31 Oktober 2013.

Tjandra, W.R. “Perspektif Hukum Administrasi Negara Fungsi OJK,” disampaikan saat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam sidang pengujian Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 08 Oktober 2014.

Widodo K, S.W., “Implikasi Hukum Penerbitan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen oleh Industri Jasa Keuangan di Indonesia,” Materi Presentasi Seminar, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013, Jakarta, 21 November 2013.

E. Internet :

Abdul Rasyid, Februari 2019, “Sekilas Perkembangan Fintech di Indonesia“, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>, diakses 06 April 2020.

Bank Indonesia, “Edukasi Financial Technology”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses 30 Februari 2020.

CNBC Indonesia, “Agar Aman, Semua Fintech Wajib Mendaftar Ke Regulator”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180112170415-37-1358/agar-aman-semua-fintech-wajib-mendaftar-ke-regulator>, diakses 7 Agustus 2020.

Irma Devita, “Fintech Lending Company – Prosedur Pendiriannya“, <https://irmadevita.com/2017/fintech-lending-company-prosedur-pendiriannya/>, diakses 11 Juli 2020.

Irmansyah, “Urgensi Perlunya Pengaturan Financial Technology“, <https://mediaindonesia.com/read/detail/78124-urgensi-perlunya-pengaturan-financial-technology-1>, diakses 7 Agustus 2020.

OJK, “FAQ Otoritas Jasa Keuangan”, <https://www.ojk.go.id>, diakses 3 Februari 2020.

OJK, “Statistik Fintech Lending Periode Mei 2020”,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech> , diakses
27 Juni 2020.

F. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6506).